

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis Ukraina yang bermula dari adanya perbedaan pandangan sosial politik di Ukraina telah menunjukkan serangkaian dinamika baru dalam kawasan Eropa, salah satunya adalah respon Jerman dalam krisis tersebut. Krisis ini bermula pada November 2013 ketika Presiden Ukraina pada saat itu yaitu Victor Yanukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan lebih memilih untuk menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dolar AS dan potongan harga gas Rusia untuk Ukraina sebesar 30 persen. Keputusan Yanukovich tersebut kemudian menuai protes dari masyarakat pro Ukraina Barat yang berlangsung di Kiev dan terus berlanjut sampai tahun baru 2014. Protes yang terjadi di Kiev tersebut pun berubah menjadi protes yang menggunakan kekerasan dan menyebabkan terbunuhnya 77 demonstran dan 600 orang mengalami luka-luka.¹

Bahkan meskipun perpecahan sosial politik yang terjadi di Ukraina telah mencapai pembahasan mengenai kesepakatan pembagian kekuasaan di pemerintahan Ukraina yang juga melibatkan beberapa mediator dari negara-negara di Eropa, nyatanya konflik sipil di Ukraina tetap terjadi bahkan semakin

¹ House of Commons, *Ukraine, Crimea and Russia* (Research Paper: 2014), hal.3

memanas. Hal tersebut dapat terlihat dari kasus semakin memanasnya konflik sipil di Ukraina pada tahun 2013 meskipun kesepakatan pembagian kekuasaan di Ukraina telah melibatkan beberapa mediator yaitu Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman dan Polandia. Pada hari setelah tercapainya kesepakatan pembagian kekuasaan di Ukraina pada 21 Februari 2014, konflik menjadi semakin memanas karena Presiden Ukraina Victor Yanukovich menghilang dari Kiev dan kemudian disusul dengan pendudukan beberapa bangunan umum pemerintahan Ukraina oleh para demonstran. Sejak hari tersebut, Victor Yanukovich resmi turun dari jabatan Presiden Ukraina dan terbentuklah pemerintahan baru di Ukraina.²

Pergolakan politik yang menghadapkan warga sipil dengan pemerintah di Ukraina semakin diperparah dengan adanya isu keterlibatan Rusia dalam *secessionism* di Krimea³. Hal tersebut bermula ketika Rusia menolak adanya otoritas baru dalam pemerintahan Ukraina setelah Presiden Victor Yanukovich melarikan diri dari Ukraina.⁴ Kemudian pada Maret 2014, Republik Otoritas Krimea memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dan bergabung dengan Rusia.⁵ Keputusan parlemen Krimea tersebut pun dinilai tidak lepas dari campur tangan

² Ibid, hal.1

³ Krimea merupakan salah satu kawasan di Ukraina yang terletak di Peninsula Krimea sebelah selatan Ukraina. Sebagian besar penduduk Krimea berasal dari etnis Rusia serta Tartar Krimea dan merupakan kawasan yang paling banyak dihuni etnis Rusia dibandingkan kawasan lainnya di Ukraina. Pada tahun 1992, terjadi ketegangan etnis di Krimea yang disebabkan oleh keinginan penduduk Krimea untuk memisahkan diri dari Ukraina. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Ukraina serta Krimea memutuskan untuk menjadikan Krimea sebagai kawasan otonomi budaya dan ekonomi, tetapi tetap merupakan bagian dari Ukraina. Dewan Kementerian Republik Otonomi Krimea, *Regional Profile: The Autonomous Republic of Crimea*, (2013), hal.2

⁴ Tadeusz Iwanski et al, *Russian Policy Towards Ukraine: Not just Crimea* (OSW, Centre for Asian Studies, 24/3/2012)

⁵ Ibid.

Rusia. Hal ini terbukti ketika Rusia menolak untuk menerima tawaran dari Barat agar dapat menyelesaikan konflik di Ukraina bersama-sama.⁶ Klaim bahwa Rusia memiliki keterlibatan dalam *secessionism* Krimea tidak dapat sepenuhnya diragukan karena pada tanggal 11 Maret 2014, Menteri Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa referendum yang dilaksanakan oleh Krimea serta deklarasi kemerdekaan Krimea yang memutuskan untuk bergabung bersama Rusia merupakan sesuatu yang legal dan valid. Bahkan, Pemerintah Rusia mengakui sepenuhnya hasil referendum dan deklarasi kemerdekaan Krimea meski otoritas Ukraina, Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak mengakui hasil referendum dan deklarasi kemerdekaan tersebut.⁷

Selanjutnya, Pemerintah Rusia juga menyediakan paspor sebagai warga negara Rusia kepada masyarakat asing yang menggunakan bahasa Rusia dalam kehidupan sehari-hari seperti masyarakat yang tinggal di Krimea.⁸ Hal tersebut tentu saja semakin menekan otoritas pemerintah Ukraina serta pihak Barat. Selain itu, tekanan tersebut juga berhasil meningkatkan ketegangan dalam internal Ukraina. Ketika pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa telah berkali-kali mengancam akan memberikan sanksi ekonomi terhadap puluhan warga Rusia dan Ukraina yang mendukung gerakan separatis dalam krisis di Ukraina, Rusia justru menganggap bahwa ancaman sanksi-sanksi tersebut hanya bersifat simbolis dan

⁶ Ibid.

⁷ Tadeusz Iwanski et al, Op.Cit.

⁸ Ibid.

membuktikan bahwa Amerika Serikat serta Uni Eropa tidak memiliki niat serius dalam menghadapi Rusia.⁹

Sementara itu, Jerman yang merupakan negara berpengaruh di Uni Eropa¹⁰ selama beberapa tahun terakhir pada awalnya mengutamakan proses negosiasi dan diplomasi¹¹ dengan Rusia terkait keterlibatan Rusia dalam krisis Ukraina. Keputusan untuk mengedepankan negosiasi dan diplomasi dengan Rusia yang telah terbukti terlibat dalam *seccesionisme* Krimea¹² dipilih oleh Jerman ditengah desakan Amerika Serikat serta beberapa negara yang juga tergabung di Uni Eropa seperti Inggris dan Prancis untuk segera menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia.¹³ Tidak hanya itu, Jerman juga menolak dengan tegas saran dari Amerika

⁹ Ibid.

¹⁰ Jerman telah memimpin kebijakan moneter Uni Eropa di European Central Bank selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, Jerman juga merupakan negara yang memimpin inisiatif *EU enlargement*. Pada saat yang sama, Jerman juga mendefinisikan posisinya sebagai negara yang memimin kendali di Eropa Tengah sehingga menjadi titik tumpu bagi Uni Eropa dalam menjaga posisi strategis dengan Rusia dan Eropa Tengah-Timur. Global Research, *Germany's Dominant Role in European Union* dalam <http://www.globalresearch.ca/germanys-dominant-role-in-the-european-union/5326785> (Diakses: 26/12/2014)

¹¹ Proses negosiasi dan diplomasi yang diterapkan oleh Jerman terhadap Rusia dapat dilihat melalui bentuk komunikasi yang diusahakan oleh Kanselir Angela Merkel dan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmer terhadap pemerintahan Rusia. Kanselir Angela Merkel tercatat telah melakukan sejumlah percakapan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak konflik di Ukraina dimulai. Selain itu, Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmer bersama dengan Menteri Luar Negeri Prancis dan Polandia mengajak menteri luar negeri Rusia Sergei Lavrov untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dalam krisis Ukraina. Steinmer juga sempat mengunjungi Kiev dan Donetsk pada sementara Gernot Eler yang merupakan kordinator hubungan Jerman-Rusia mengunjungi Moskow. Anna Kwiatkowska-Drozd dan Konrad Poplawski, *The German Reaction to the Russian-Ukrainian Conflict- shock and disbelief*, (OSW 2014), hal. 1

¹² Rusia berhasil menarik rakyat Krimea untuk melakukan referendum dan hasil terakhir menyatakan bahwa 95 persen rakyat Krimea setuju untuk bergabung dengan Rusia.

¹³ BBC, Ukraine Crisis: EU Ponders Russia Sanction over Crimea Vote

Serikat untuk segera mengeluarkan Rusia dari keanggotaan negara G8¹⁴ meskipun Amerika Serikat, Inggris dan Prancis merupakan sekutu Jerman dalam aliansi NATO. Selain itu, Inggris, Prancis dan Jerman sama-sama tergabung dalam Uni Eropa.

Keputusan Jerman untuk menerapkan proses negosiasi dan diplomasi terhadap Rusia sebenarnya merupakan salah satu unsur dalam *Ostpolitik*. *Ostpolitik* merupakan bingkai kerja khusus kebijakan Jerman terhadap Rusia.¹⁵ Dalam *Ostpolitik* yang telah mengalami pembaruan setelah reunifikasi Jerman, dijelaskan bahwa elit politik di Jerman selalu mempercayai jika stabilitas Eropa hanya dapat dicapai bersama Rusia. Persepsi tersebut telah muncul sejak terjadinya pasifikasi elit politik di Jerman setelah Perang Dunia II dan terus berkembang akibat hubungan suplai energi dan rekan perdagangan yang terjalin antara Jerman dan Rusia.¹⁶ Selain itu, Jerman menolak usulan AS untuk menjatuhkan restriksi visa, larangan perjalanan menuju Rusia, sanksi perdagangan, aset keuangan serta embargo minyak terhadap Rusia karena adanya kekhawatiran terhadap dampak buruk pada sektor energi serta industri.¹⁷

¹⁴ Pada akhirnya Rusia resmi keluar dari G8 pada tanggal 3 Maret 2014. House of Common, OpCit., hal.5.

¹⁵ Stefan Meister, *Reframing Germany's Russia Policy- An Opportunity for the EU*, (European Council on Foreign Relations, 2014), hal.2

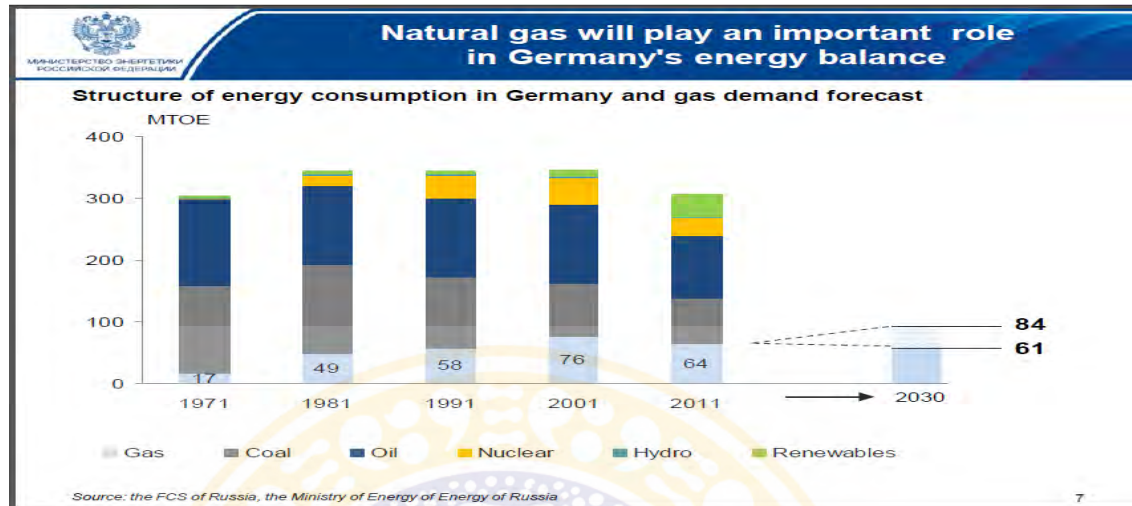
¹⁶ Di bawah kepemimpinan Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman, proyek pembangunan jalur pipa gas Nord Stream yang menyalurkan gas alam dari Rusia langsung menuju Jerman terus dilanjutkan seiring dengan meningkatnya konsumsi gas alam Jerman. Selain itu, pada tahun 2008 Kanselir Angela Merkel mengajak Rusia dalam program *Partnership for Modernisation* sebagai salah satu proyek yang mewakili hubungan mitra strategis Jerman-Rusia.

¹⁷ Ian Traynor, *Ukraine Crisis: any EU sanctions are unlikely to make impression on Putin*, dalam <http://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/ukraine-crimea-crisis-eu-sanctions-impressions-putin> [Diakses: 17/1/2015]

Dalam hal suplai energi, Rusia telah menjadi penyedia gas alam terbesar bagi Jerman. Sebagai negara yang menggantungkan perekonomiannya pada kapabilitas industri, ketersediaan gas alam menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup Jerman. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya konsumsi gas alam oleh Jerman, adanya suplai gas alam dari Rusia juga menjadi krusial bagi perekonomian Jerman dan pada akhirnya, impor gas alam Rusia oleh Jerman juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1971, konsumsi gas alam oleh Jerman adalah 17 MTOE dan terus meningkat menjadi 58 dan 76 MTOE pada tahun 1991 dan 2001 lalu 64 MTOE pada tahun 2011 (lihat tabel 1.1). Pada tahun 1995, Jerman mengimpor 79 persen gas alam dari Rusia lalu meningkat menjadi 80, 79, 81, 84, 85, 87, dan 90 persen pada tahun 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, dan 2011 yang memposisikan Rusia sebagai penyedia gas alam terbesar bagi Jerman (lihat tabel 1.2).¹⁸

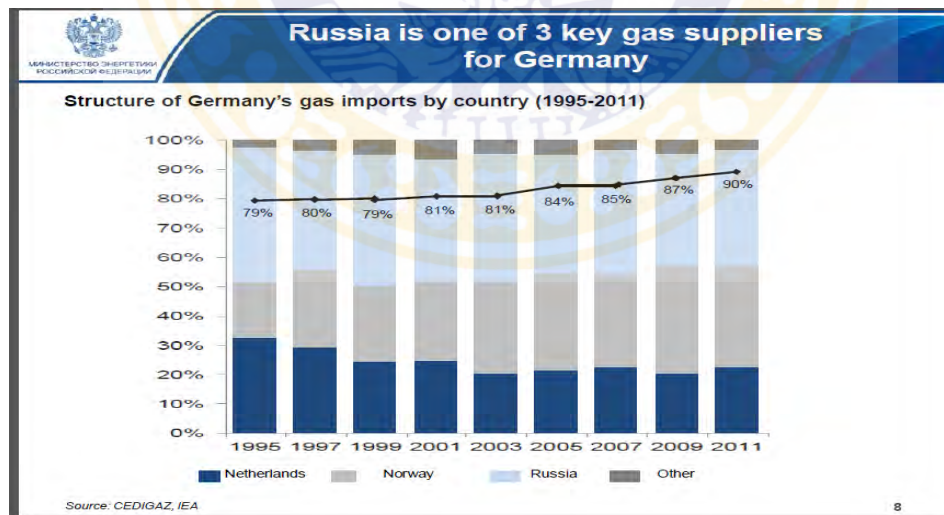
¹⁸ Alexander Novak, *Russian-Germany Strategic Partnership* (Moskow: The Ministry of Energy of Russia, 2012)

Tabel 1.1. Konsumsi gas alam oleh Jerman (1971-2011) (dalam satuan MTOE)¹⁹



Sumber: Alexander Novak, *Russian-Germany Strategic Partnership*, (The Ministry of Energy of Russia), 2012.

Tabel 1.2. Penyuplai gas alam untuk Jerman (1996-2011)²⁰



Sumber: Alexander Novak, *Russian-Germany Strategic Partnership*, (The Ministry of Energy of Russia), 2012.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid.

Sebaliknya, Jerman merupakan salah satu penyuplai investasi terbesar ke Rusia. Hal ini dibuktikan dari besarnya total FDI dari Jerman yang ada di Rusia. Misalnya saja pada industri manufaktur otomotif yang merupakan sektor penerima projek FDI tertinggi di Rusia, mayoritas pemilik projek FDI tersebut berasal dari negara-negara di Eropa Barat terutama Jerman.²¹ Tercatat pada tahun 2012 saja, investasi yang berasal dari Jerman dalam bidang manufaktur otomotif telah berkontribusi hingga 21,1 persen dari total proyek yang ada serta terciptanya sekitar 35.9 persen lapangan pekerjaan di Rusia. Selain dalam sektor otomotif, Jerman juga menjadi penyuplai investasi utama dalam bidang kimia. Lebih dari separuh projek investasi dalam bentuk perusahaan kimia berasal dari Jerman seperti perusahaan BASF, Dow Chemicals, Lansxess, dan Thyssenkrupp. Sehingga tentu saja tanpa adanya negara CIS, Jerman juga berperan sebagai negara eksportir utama bagi Rusia (lihat tabel 1.3).

²¹ Ernst & Young, *Russia 2013: Shaping Russia's Future* (Ernest & Young's Attractiveness Survey, 2013), hal. 19

Tabel 1.3. Daftar mitra dagang terbesar bagi Rusia dan nilai total impor dan ekspor (termasuk suplai minyak), dalam persen, tahun 2006²²

Rusia impor dari		Rusia ekspor ke	
Jerman	16,0	Belanda	13,8
China	11,2	Italia	9,7
Korea	5,9	Jerman	9,4
Amerika Serikat	5,6	China	6,1

Sumber: Kantor Statistik Federasi Rusia, 2007

Namun, sejak 13 Maret 2014 pemerintah Jerman yang diwakili oleh Kanselir Angela Merkel dan Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeier menyatakan bahwa adanya eskalasi konflik di Ukraina Timur dan Selatan mendorong Jerman untuk melakukan tindakan yang menunjukkan tanggung jawab Jerman. Merkel lebih lanjut menjelaskan bahwa tanggung jawab Jerman tidak dapat dilakukan dibalik aksi semua pihak dan tidak dapat pula dilakukan dengan mengabaikan pelanggaran yang ada seperti yang diharapkan oleh industri Jerman. Bagi Merkel, usaha untuk memperbaiki perbatasan seperti yang dilakukan oleh Rusia saat ini setelah 70 tahun berakhirnya Perang Dunia II merupakan pelecehan terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Jerman, Merkel mendukung adanya sanksi ekonomi yang lebih berat terhadap Rusia jika Rusia terbukti masih melanjutkan aksi yang mendorong ketidakstabilan Ukraina,

²² Roland Gotz, *Germany and Russia- Strategic Partners?* (Geopolitical Affairs, 2007), hal.2

sekalipun Jerman juga harus menanggung kerugian ekonomi akibat memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia.²³

Selanjutnya pemerintah Jerman bersama dengan Inggris, Prancis, Italia dan Amerika Serikat juga menyepakati adanya sanksi ekonomi dari Uni Eropa yang lebih luas dan keras terhadap Rusia pada bulan-bulan selanjutnya hingga 28 Juli 2014 (lihat linimasa pada tabel 1.4). Sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa dan Amerika Serikat pada saat itu telah mencapai tahap ketiga yaitu menyasar pada seluruh sektor ekonomi Rusia dan larangan perdagangan senjata. Selain itu, Jerman juga menyepakati adanya sanksi tambahan untuk Rusia dari Uni Eropa yang menyasar pada proyek infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan energi serta jasa keuangan Rusia.²⁴ Respon Jerman terhadap Rusia yang berubah dari menerapkan jalan damai melalui proses diplomasi dan negosiasi menjadi asertif dengan menyepakati dan mendukung adanya sanksi yang lebih berat terhadap Rusia tentu saja menjadi bentuk kebijakan yang kontras dengan *Ostpolitik* yang selama ini telah menjadi acuan kebijakan Jerman terhadap Rusia.

²³ Jerman pada akhirnya resmi menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia melalui Uni Eropa pada tanggal 16 Maret 2014. Andreas Rinke, *How Putin Lost Berlin*, (German Council on Foreign Relations: 29/9/2014), hal.9

²⁴ Ben Smith, *Sanctions Against Russia over Ukraine*, (House of Commons: 2014), hal.10

Tabel 1.4. Linimasa sanksi ekonomi terhadap Rusia (Maret – September 2014)²⁵

Maret	April	Mei	Agustus	September
UE dan AS menjatuhkan sanksi halus pertama kepada Rusia: larangan perjalanan, pembekuan aset milik individu tertentu.	Rusia membalas menjatuhkan sanksi halus terhadap AS: larangan perjalanan terhadap individu tertentu.	UE dan AS menjatuhkan sanksi halus yang lebih luas terhadap Rusia: larangan bisnis dengan perusahaan tertentu.	UE menjatuhkan sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap Rusia: membatasi akses ke pasar modal UE, pembatasan ekspor dan embargo senjata. Rusia membalas terhadap Barat: larangan impor makanan.	Dikhawatirkan terjadi peningkatan ketegangan antara kedua belah pihak akibat aksi saling membalas sanksi.

Sumber: Roland Berger Strategic Consultant, 2014.

Sementara itu, respon Jerman untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia tentu saja memiliki konsekuensi yang juga berdampak pada perekonomian Jerman sebagai mitra utama dalam perdagangan dan kerjasama pembangunan Rusia. Alih-alih menekan Rusia melalui kerugian yang ditimbulkan oleh sanksi ekonomi hingga akhirnya bersedia mundur dari Ukraina, Rusia justru memiliki peluang untuk memberikan kerugian besar bagi perekonomian Jerman melalui hubungan

²⁵ Roland Berger Strategy Consultant, *The Impact of Economic Sanctions*, (Roland Berger 2014), hal.3

perdagangan dan investasi.²⁶ Sehingga sanksi ekonomi tersebut dapat mengganggu suplai energi terutama gas alam dan minyak bumi bagi Jerman.²⁷ Selain itu, sanksi ekonomi terhadap Rusia juga menjadi sumber masalah utama bagi hasil keuangan sebagian besar industri Jerman yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan keuntungan di pasar Uni Eropa akibat krisis keuangan yang masih berlangsung.²⁸

Selain itu, perubahan respon yang diberikan oleh Jerman dibawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel terhadap Rusia pada krisis Ukraina tidak hanya bertentangan dengan hubungan kerjasama dalam energi dan pembangunan ekonomi diantara keduanya, tetapi juga bertolakbelakang dengan pola respon Kanselir Angela Merkel terhadap Rusia terkait konflik-konflik serupa yang terjadi sebelum Krisis Ukraina tahun 2013.²⁹ Pada peristiwa tersebut, Kanselir Angela Merkel dan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmer memutuskan

²⁶ Bagi Jerman, perdagangan dengan Rusia bernilai 77 miliar euro pada tahun 2013. Rusia merupakan tujuan lebih dari 3 persen produk ekspor Jerman. Selain itu, total impor minyak dan gas Rusia oleh Jerman mencapai 84 persen. Jumlah perusahaan Jerman yang produktif di Rusia berjumlah lebih dari 6.200 perusahaan, melebihi jumlah perusahaan dari negara-negara Uni Eropa lainnya. Sehingga jumlah FDI dari Jerman yang masuk ke Rusia mencapai kisaran 23 miliar Euro. Ibid, hal.10

²⁷ Jika suplai minyak bumi dari Rusia menjadi terbatas akibat sanksi ekonomi, maka sektor penyulingan minyak di Jerman sebelah Timur yaitu Schwedt yang merupakan konsorsium dari Shell, BP, Total, Eni & Rosneft serta Leuna akan mengalami kendala serius karena mereka menggantungkan suplai minyak bumi sepenuhnya dari Rusia. Sehingga hal ini selanjutnya akan berdampak pada terbatasnya kapasitas produksi penyulingan Schwedt. Sumber: Ibid, hal.6.

²⁸ Sementara itu, dalam hal investasi, industri-industri di Jerman yang telah menanamkan investasinya di Rusia akan mengalami kerugian akibat turunnya nilai mata uang Rusia sehingga menyebabkan kerugian serius dalam nilai pendapatan yang dikirimkan dari Rusia menuju Jerman. Selain itu, perusahaan-perusahaan asal Jerman juga mengkhawatirkan lemahnya posisi negosiasi mereka dalam kompetisi untuk mendapatkan kontrak dengan Rusia dalam rangka piala dunia FIFA yang akan diselenggarakan di Rusia pada tahun 2018. Ibid.

²⁹ Thomas Valasek, *What does the War in Georgia Mean for EU Foreign Policy?* (Centre for European Reform, 2008), hal.1

untuk tidak memihak siapapun dan tidak berniat untuk memberikan tekanan pada Rusia.³⁰ Ketika pemerintah Jerman mulai mengecam aksi Rusia di Georgia, hal tersebut masih dianggap kurang kuat dan agresif dibandingkan yang diharapkan oleh Amerika Serikat pada saat itu yaitu dengan melakukan invasi agresif ataupun sanksi terhadap Rusia.³¹ Begitupula dengan reaksi Jerman pada revolusi Oranye pada tahun 2005 dimana Jerman tidak memberikan reaksi yang signifikan terhadap Rusia dan terkesan lebih menggantungkan pada pandangan Rusia dalam menyusun kebijakan terhadap Ukraina.³²

Tidak hanya dikarenakan oleh adanya hubungan mitra perdagangan antara Jerman dan Rusia, tetapi juga bertentangan dengan opini publik di Jerman. Berdasarkan penghitungan suara opini publik Jerman terkait isu sanksi yang dilegitimasi oleh Jerman terhadap Rusia, sebanyak 69 persen masyarakat Jerman berpendapat bahwa pemberian sanksi terhadap Rusia tidak dapat membantu menyelesaikan situasi krisis di Ukraina.³³ Selain itu, para pihak dalam sektor bisnis dan industri serta tokoh politik di Jerman seperti mantan Kanselir Schroder dan Helmut Schmidt menentang keras keputusan Jerman bersama Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang lebih keras dan luas terhadap Rusia.³⁴ Bahkan, lingkaran dalam pembuat keputusan di Jerman mayoritas berasal dari partai Sosial

³⁰ Christopher S. Chivvis dan Thomas Rid, *The Roots of Germany's Russia Policy* (Survival vol.51, no.2, 2009), hal.1.

³¹ Ibid.

³² Derek Fraser, *Taking Ukraine Seriously: Western and Russian Responses to the Orange Revolution* (2006), hal.19

³³ Handelsblatt, *Mehrheit der Deutschen halt nichts von Sanktionen*, (Handelsblatt 2014) tersedia dalam <http://www.handelsblatt.com/politik/international/umfrage-mehrheit-der-deutschen-haelt-nichts-vonsanktionen/9609838.html>.

³⁴ Stefan Meister, OpCit., hal.5

Demokrat yang selama ini dikenal sebagai pihak yang konsisten menerapkan *Ostpolitik* sehingga selalu mengedepankan hubungan baik dengan Rusia.³⁵

Ukraina memang memiliki arti penting bagi Rusia dan Barat sehingga kedua pihak memiliki posisi masing-masing dalam krisis yang terjadi sejak tahun 2013 lalu. Namun, perubahan respon Jerman yang menjadi lebih asertif terhadap Rusia sejak 13 Maret 2014 dalam kasus krisis Ukraina ditengah meningkatnya hubungan kerjasama dan perdagangan diantara keduanya menjadi suatu pertanyaan besar. Oleh karena itu, perubahan respon Jerman di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel terhadap keterlibatan Rusia dalam krisis Ukraina di tengah adanya hubungan mitra perdagangan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah perubahan respon Jerman terhadap Rusia dalam Krisis Ukraina. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa Jerman pada akhirnya menyepakati pemberian sanksi ekonomi setelah sebelumnya mengutamakan proses damai terhadap Rusia meskipun terdapat hubungan kerjasama energi dan pembangunan ekonomi diantara keduanya?

³⁵ Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmer, Kepala kordinasi hubungan Jerman-Rusia Gernot Erler dan Menteri Keuangan Jerman merupakan beberapa contoh lingkaran dalam pembuatan keputusan oleh Kanselir Angela Merkel yang berasal dari Partai Sosial-Demokrat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan Jerman mengubah responnya terhadap Rusia yang merupakan mitra perdagangan utama serta negara yang diyakini Jerman dapat dijadikan mitra untuk menjaga stabilitas Eropa dalam *Ostpolitik*. Dengan adanya perubahan respon menjadi mendukung sanksi ekonomi terhadap Rusia, tentu saja Jerman harus menerima konsekuensi berupa guncangan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain yang memiliki kerjasama strategis terutama dalam sektor energi dan perdagangan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Dalam kasus perubahan respon Jerman terhadap keterlibatan Rusia dalam krisis Ukraina yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, kategori perubahan kebijakan luar negeri yang sesuai adalah perubahan masalah atau tujuan.³⁶ Hal ini

³⁶ Kategori perubahan kebijakan luar negeri dalam penelitian ini merupakan perubahan dalam masalah atau tujuan karena dalam kasus penelitian ini, yang berubah memang merupakan aspek masalah atau tujuan dalam kebijakan Jerman terhadap Rusia. Pada dasarnya, terdapat empat kategori perubahan kebijakan luar negeri antara lain: perubahan tingkat usaha kebijakan yaitu lebih keras atau lebih lemah daripada sebelumnya, perubahan program yaitu strategi untuk menjangkau tujuan negara melalui kebijakan tersebut, perubahan masalah atau tujuan kebijakan suatu negara serta perubahan orientasi internasional yang ditandai dari adanya perubahan orientasi aktor dalam negara terhadap serangkaian aksi spesifik oleh aktor lain dan melibatkan pergeseran dasar dalam peran internasional, tidak hanya dalam satu kebijakan tetapi dalam banyak kebijakan terhadap negara lain. Charles Hermann, *Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy*, (International Studies Quarterly, Vol.34, No.1, 1990), hal.5.

disebabkan adanya perubahan signifikan pada tujuan *Ostpolitik*. Dalam *Ostpolitik*, tujuan strategis Jerman pada tingkat bilateral dan Eropa adalah berfokus pada stabilitas hubungan dengan Rusia dan mempertimbangkan hubungan dengan Rusia sebagai persyaratan dasar memperluas jaringan kerjasama.³⁷ Namun, respon Jerman untuk mendukung adanya sanksi yang lebih luas terhadap Rusia sebagai usaha tanggungjawab Jerman untuk melindungi kepentingan vital Jerman di Ukraina menandakan adanya perubahan tujuan strategis pada *Ostpolitik*.

Sementara itu, dalam skema bagaimana perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah, terdapat beberapa agen primer perubahan yang memiliki kecenderungan untuk berperan besar dalam berubahnya suatu kebijakan (lihat skema 1). Agen-agen primer tersebut antara lain: kendali pemerintah, advokasi birokrasi, restrukturisasi domestik serta dorongan eksternal.³⁸ Agen-agen primer perubahan tersebut dapat secara langsung mengubah kebijakan luar negeri jika hal-hal tersebut berperan secara aktif dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Setelah melalui serangkaian proses pengambilan keputusan seperti ekspektasi kebijakan awal, rangsangan dari aktor eksternal atau lingkungan, deteksi ketidaksesuaian informasi, postulasi kaitan antara masalah dan kebijakan, pengembangan alternatif, membangun konsensus otoritatif terhadap pilihan serta implementasi kebijakan yang baru.³⁹ Setelah itu, terlihat lah

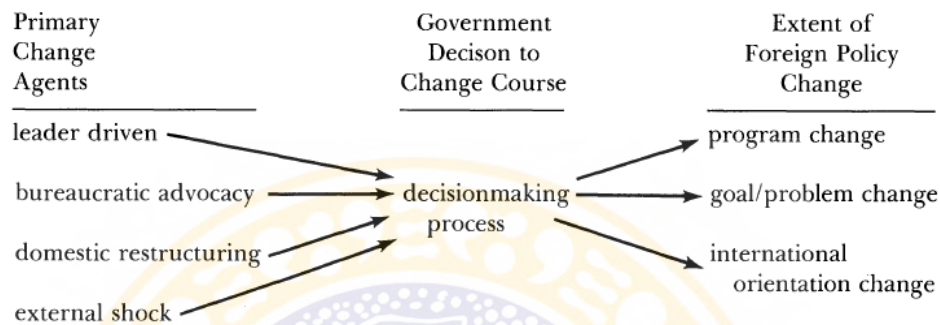
³⁷ Iris Kempe, *From A European Neighborhood Policy Toward A New Ostpolitik- The Potential Impact of German Policy*, (Center for Apply Policy Research 2006), hal.14

³⁸ Ibid, hal.10

³⁹ Ibid, hal. 13

bentuk perubahan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara terhadap isu-isu tertentu ataupun terhadap negara lain.

Skema 1.1. Sistem terbentuknya perubahan kebijakan luar negeri⁴⁰



Sumber: Charles Hermann, *Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy*, (International Studies Quarterly, Vol.34, No.1), 1990.

Oleh karena itu, dalam menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini, maka peneliti harus menentukan terlebih dahulu agen primer mana yang memiliki peran signifikan dalam perubahan respon Jerman. Jika dilihat dalam hal kendali pemimpin, Kanselir Angela Merkel tidak dapat memutuskan sendiri perubahan kebijakan Jerman karena sistem pemerintahan Jerman yang demokratis sehingga Merkel juga harus memperhatikan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan seperti lingkaran dalam pemerintahan serta kelompok bisnis. Sementara itu, sulit ditemukan tokoh berpengaruh dalam lingkaran pemerintahan Jerman yang sejak awal memiliki posisi kontra terhadap Rusia dan mendorong agar Jerman menjatuhkan sanksi pada Rusia karena sebagian besar posisi pemerintahan

⁴⁰ Ibid, hal.12

diduduki oleh anggota Partai Sosial Demokrat yang menjunjung tinggi stabilitas hubungan Jerman-Rusia.⁴¹ Oleh karena itu, dorongan eksternal lah yang diduga menjadi agen primer dalam perubahan respon Jerman terhadap Rusia dalam krisis Ukraina.

1.4.2 Peringkat Analisis Sistem Internasional

Dalam menentukan peringkat analisis, hal-hal yang harus diperhatikan adalah adanya eksplanandum dan eksplanan.⁴² Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditentukan bahwa eksplanandumnya adalah respon Jerman yang berubah menjadi menekan Rusia dengan cara menjatuhkan sanksi ekonomi meski mulanya memutuskan untuk melakukan pendekatan damai. Sementara itu, eksplanannya adalah sifat dari sistem dimana kebijakan Jerman terhadap Rusia dalam krisis Ukraina dibuat. Pada penelitian ini, sistem yang digunakan oleh peneliti adalah tipe sistem pada perspektif neorealis yaitu anarki dalam sistem internasional.

Dalam sistem anarki, negara-negara dihadapkan pada pilihan mengimbangi negara lain (*balancing*) atau hanya mengikuti negara lain yang memiliki

⁴¹ Anna Kwiatkowska-Drozd dan Konrad Poplawski, OpCit.

⁴² Eksplanandum atau variabel dependen merupakan proses dan hasil dari para pengambil keputusan yang ditujukan atau memiliki konsekuensi terhadap entitas luar negeri. Sementara itu, eksplanan atau variabel independen merupakan faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan pada kasus yang diamati dalam penelitian. Setelah itu, peringkat analisis dapat dipilih oleh peneliti berdasarkan eksplanandum dan eksplanan yang ada dalam kasus yang diteliti. Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations* (Foreign Policy Analysis (1), 2005), hal.2

kapabilitas lebih besar (*bandwagoning*).⁴³ Peneliti meyakini bahwa konteks sistem anarki yang kemudian mendorong Jerman untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pemberian sanksi ekonomi yang lebih luas kepada Rusia merupakan eksplanan yang tepat untuk menganalisis penelitian ini. Argumen tersebut berdasarkan data dan penjelasan yang sebelumnya telah dijabarkan oleh peneliti bahwa kendali individu pemimpin, lingkaran dalam pemerintahan, opini publik, ketersediaan sumber daya energi serta kerjasama ekonomi tidak cukup untuk menjelaskan perubahan respon Jerman terhadap Rusia.

Selain itu, posisi suatu negara berdasarkan kapabilitas kekuatan yang dimiliki untuk memengaruhi sistem internasional juga menjadi fokus pada peringkat analisis sistem internasional. Posisi tersebut yang kemudian menjelaskan pilihan-pilihan apa yang terbuka bagi negara dalam posisi tertentu dan tindakan mana yang harus dilakukan negara dalam posisi tertentu pada sistem internasional. Oleh karena itu, diperlukan pula analisis dalam struktur domestik Jerman sebagai negara yang memiliki posisi dominan di NATO dan Uni Eropa dalam memecahkan masalah penelitian ini.⁴⁴

⁴³ Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis 2nd Edition: Classic and Contemporary Theory*, (Rowman & Littlefield 2014), hal. 173.

⁴⁴ Dalam menggunakan peringkat analisis sistem internasional, struktur domestik negara yang bersangkutan juga harus diperhatikan. Struktur domestik negara tersebut lah yang kemudian menunjang posisinya dalam kawasan dan global. Pada kasus dalam penelitian ini, kapabilitas ekonomi dan politik Jerman dalam Uni Eropa yang menunjang posisi Jerman menjadi salah satu fokus alasan perubahan respon Jerman. Laura Neack, *The New Foreign Policy: The Power Seeking in A Globalized Area*, (Rowmann & Littlefield 2008) hal.132

1.4.3 Teori *Balance of threat*

Dalam menganalisis perubahan respon Jerman terhadap Rusia dalam krisis Ukraina melalui peringkat analisis sistem internasional, peneliti menggunakan teori *balance of threat*. Alasan peneliti menggunakan teori *balance of threat* adalah karena adanya indikasi ancaman dari Rusia dalam krisis Ukraina yang kemudian mendorong Jerman untuk mendukung dan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia bersama AS dan Uni Eropa sebagai usaha mengimbangi ancaman dari Rusia. Berbeda dengan teori *balance of power*⁴⁵, teori *balance of threat* lebih berfokus pada penggunaan kekuatan untuk mengimbangi ancaman dari lawan.⁴⁶

Dalam analisis dengan menggunakan teori *balance of threat*, Stephen Walt menjelaskan bahwa ancaman dari negara lain dengan sederhana dapat dilihat jika suatu negara secara tidak biasa menjadi agresif sehingga pihak yang berpotensi menjadi korban dari tindakan agresif tersebut akan berusaha untuk mengurangi kekuatan lawan yang mengancam dengan mengerahkan kekuatan yang dimiliki, mengurangi tujuan agresif atau bahkan menghilangkan keseluruhan tujuan serta

⁴⁵ Teori *balance of power* oleh Kenneth Waltz menjelaskan bahwa stabilitas sistem dapat dicapai karena adanya keseimbangan kekuatan. Oleh karena itu, negara akan selalu berusaha mengimbangi kekuatan negara lain dengan cara membentuk aliansi. Andreas M. Bock dan Ingo Henneberg, *Why Balancing Fails: Theoretical Reflections on Stephen M. Walt's "Balance of threat" Theory*, (Lehrstuhl Internationale Politik, Universitat zu Koln 2013), hal.3

⁴⁶ Oleh karena itu, fokus dalam *balance of threat* bukan pada keseimbangan kekuatan antar negara melainkan adanya balasan ancaman dari negara yang bersangkutan. Sehingga strategi *balancing* yang dilakukan berdasarkan hal apa yang dapat menjadi ancaman yang sama bagi negara lawan. Salah satu ancaman yang dapat dilakukan dalam strategi *balancing* adalah menjatuhkan sanksi ekonomi atau embargo. Anders Wivel, *Balancing Against Threats or Bandwagoning with power? Europe and the Transatlantic Relationship after the Cold War*, (Cambridge Review of International Affairs 2008), hal. 297

kekuatan lawan.⁴⁷ Oleh karena itu, Stephen Walt menjelaskan bahwa suatu negara membentuk aliansi atau bekerjasama dengan sekutunya pada aliansi untuk mencegah kekuatan yang lebih mendominasi dan untuk melindungi diri dari negara atau koalisi yang berpotensi menjadi ancaman berdasarkan proksi geografi, kekuatan ofensif dan niat agresif.⁴⁸

Selain itu, perilaku negara dalam menghadapi ancaman juga dipengaruhi oleh kapabilitas kekuatan yang dimiliki. Jika suatu negara termasuk ke dalam golongan *great power* yang memiliki sejumlah kapabilitas politik maupun ekonomi serta dapat menggunakan kekuatannya dalam waktu yang menurutnya diperlukan dan dapat menguntungkan posisinya, maka negara tersebut cenderung untuk mengancam balik negara yang dianggapnya sebagai ancaman.⁴⁹ Dalam memberikan ancaman balik, negara yang tergolong dalam *great power* dapat memanfaatkan aliansi yang terdiri dari negara-negara yang memiliki ideologi yang sama dengan negara tersebut serta memiliki ancaman yang sama.⁵⁰

1.4.4 Teori respon dalam kebijakan luar negeri

Terdapat beberapa perbedaan penjelasan mengenai unsur respon dalam kebijakan luar negeri. Dalam penjelasan mengenai kebijakan luar negeri oleh Charles Hermann, tidak dijelaskan secara jelas dalam batasan apa suatu respon atau tindakan oleh suatu negara dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan luar negeri.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Michael P. Watson, *Balance of Power vs Balance of Threat: The Case of China and Pakistan* (United States Marine Corps 2001), hal.2

⁴⁹ Laura Neack, OpCit., hal.142.

⁵⁰ Sangit Sarita Dwivedi, *Alliances in International Theory*, (IRJC 2012), tersedia dalam International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, vol.1, no.8, hal.231.

Hermann menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai hasil dari keputusan pemimpin negara atau lingkaran pemerintahan yang berupa tindakan dengan tujuan yang jelas.⁵¹ Sementara itu, Bruce Russett, Harvey Starr dan dan David Kinsella memiliki penjelasan yang bertolak belakang dengan Hermann bahwa kebijakan luar negeri bukan berupa tindakan oleh negara melainkan panduan bagi negara untuk berperilaku sesuai dengan tujuan yang ditargetkan.

Deborah Garner kemudian menjelaskan kebijakan luar negeri melalui pemahaman yang lebih luas yaitu berupa niat, pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh aktor baik negara maupun pihak di luar negara serta respon dari pihak lain terhadap niat, pernyataan serta tindakan tersebut. Penjelasan oleh Deborah Garner ini lah yang digunakan oleh Laura Neack dengan alasan bahwa kebijakan luar negeri tidak cukup hanya dilihat melalui tindakan nyata berdasarkan tujuan yang dimiliki oleh negara. Lebih dari itu, analisis kebijakan luar negeri juga harus melingkupi bagaimana beberapa tujuan negara muncul dan mengapa kemudian menghasilkan perilaku tertentu oleh negara yang dapat dilihat dari respon suatu negara terhadap masalah tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori respon dalam kebijakan luar negeri yang dijelaskan oleh Laura Neack bahwa respon suatu negara dalam bentuk niat, pernyataan ataupun tindakan terhadap suatu permasalahan dan tindakan negara lain termasuk dalam kebijakan luar negeri.

⁵¹ Laura Neack, *OpCit.*, hal.9

1.4.5 Sintesis Teori

Berdasarkan kerangka pemikiran yang terdiri dari penjelasan mengenai perubahan kebijakan luar negeri, peringkat analisis sistem internasional, teori respon dalam kebijakan luar negeri dan *balance of threat*, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan respon suatu negara terhadap negara lainnya yang meskipun memiliki hubungan kerjasama energi serta pembangunan ekonomi ternyata dapat disebabkan oleh kuatnya dorongan eksternal pada tingkat sistem. Peringkat analisis sistem internasional yang menganalisis kebijakan luar negeri dalam tingkat sistem, teori *balance of threat* dalam perspektif neorealis serta teori respon menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu negara memberikan respon yang dapat berupa niat, pernyataan ataupun tindakan terhadap negara lain berdasarkan anggapannya terhadap ancaman dari negara lain. Dalam menentukan respon yang tepat untuk mengimbangi ancaman tersebut, suatu negara biasanya berperilaku sesuai dengan kapabilitas kekuatan yang dimiliki. Berdasarkan kapabilitas kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh Jerman, Jerman dapat memanfaatkan aliansi untuk melakukan perlawanan bersama-sama dengan negara-negara lain yang tergabung pada aliansi tersebut untuk memberikan ancaman balik terhadap lawan.

1.5 Hipotesis

Perubahan respon Jerman yang semula menekankan proses damai dan stabilitas hubungan strategis dengan Rusia menjadi memutuskan untuk mendukung adanya sanksi ekonomi pada kasus Krisis Ukraina disebabkan oleh adanya ancaman dari

tindakan Rusia sehingga menyebabkan Jerman untuk berusaha mengimbangi ancaman tersebut dengan memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia bersama-sama sekutunya dari NATO dan Uni Eropa yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Prancis yang sebelumnya telah memiliki inisiatif dan juga telah mendorong Jerman untuk menjatuhkan sanksi.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Persepsi Ancaman

Kenneth Waltz menjelaskan persepsi ancaman sebagai suatu kondisi dimana setiap negara saling melihat satu sama lain sebagai musuh potensial karena setiap negara memiliki kecenderungan untuk menjadi penyerang jika memenuhi beberapa persyaratan yang sebagian besar ditentukan oleh kapabilitas kekuatan untuk melakukan apa yang diinginkan terhadap negara lain.⁵² Selain itu, dalam sistem internasional, dapat dilihat determinasi yang jelas antara negara mana yang menganggap negara lain sebagai ancaman dan negara mana yang dianggap sebagai suatu ancaman serta dalam kondisi apa suatu negara cenderung melakukan perang atau membentuk aliansi dalam menghadapi ancaman.⁵³

⁵² Felipe Mendez Sozzi Miguel, *Threat Perception in International Relations: The Realist and the Liberal Accounts*, (Brazilian Journal of International Relations, vol.2, no.3, 2013), hal.487

⁵³ Ibid., hal.489

1.6.1.2 *Balancing*

Hans Morgenthau dan Kenneth Thompson menjelaskan definisi *balancing* sebagai suatu usaha oleh suatu negara untuk menetralkan kekuatan negara lain dengan cara meningkatkan kekuatan yang dimiliki setidaknya sampai pada titik seimbang jika tidak dapat melebihi kekuatan negara lain.⁵⁴ Sementara itu, Nexon menjelaskan *balancing* sebagai suatu perilaku negara untuk mengurangi kerentanan politik atau mencegah kehilangan kendali terhadap teritori serta kepentingan vital dengan cara meningkatkan kapabilitas mereka sendiri, menyatukan kapabilitas atau mengurangi kapabilitas dari negara yang mengancam.⁵⁵ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *balancing* dapat didefinisikan sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh negara untuk mengubah kekuatan relatif yang dimiliki *versus* kekuatan yang dimiliki oleh negara yang dianggap sebagai ancaman menjadi keuntungan dalam meraih keamanan dalam sistem anarki.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Persepsi Ancaman

Suatu negara dianggap sebagai suatu ancaman dari negara lain jika tindakan negara tersebut mengancam pertahanan dan keamanan serta integritas kawasan negara terancam yang bersangkutan.⁵⁶ Sementara itu, Stephen M. Walt menjelaskan bahwa terdapat empat penyebab suatu negara dianggap sebagai

⁵⁴ Hans J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, eds., *Principles and Problems of International Politics*, (New York 1950), hal.103.

⁵⁵ Daniel Nexon, *The Balance of Power in the Balance*, (World Politics 61, no.2, 2009), hal.342.

⁵⁶ Kai He, *Undermining Adversaries: Unipolarity, Threat Perception and Negative Balancing Strategies After the Cold War* (Security Studies vol.21, no.2, 2014), hal.174

ancaman oleh negara lain. Pertama, menggunakan kumpulan kekuatan atau sumber daya total yang dimiliki untuk mengancam keamanan negara lain. Kedua, kedekatan geografis diantara negara yang mengancam dan terancam. Kedekatan geografis tersebut ditandai dengan adanya kedekatan jangkauan jarak serta adanya kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi kedua negara untuk berinteraksi.⁵⁷ Ketiga, kapabilitas kekuatan ofensif untuk mengancam negara lain serta intensi dan aksi agresif yang berpotensi mengganggu stabilitas suatu negara atau kawasan.⁵⁸

Pada penelitian ini, tindakan Rusia yang dianggap sebagai ancaman oleh Jerman adalah tindakan agresif yang disertai dengan penggunaan kekuatan militer di kawasan Krimea, Ukraina Timur dan Selatan. Tindakan tersebut dianggap oleh Jerman dan sekutunya sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan Eropa dan negara-negara lain yang memiliki ruang pengaruh di Ukraina. Selain itu, Jerman berlokasi di Eropa Tengah dan merupakan negara dengan kekuatan dominan di Uni Eropa yang berlokasi paling dekat dengan Rusia sehingga berdasarkan definisi ancaman oleh Stephen Walt, Jerman menerima ancaman yang lebih besar.

1.6.2.2 *Balancing*

Balancing diindikasikan dari adanya empat atribut, antara lain: *balancing* merupakan perilaku negara⁵⁹, bertujuan untuk meraih keamanan, harus membidik

⁵⁷ Harvey Starr, *Territory, Proximity and Spatiality: The Geography of International Conflict* (International Studies Review vol.7, 2005), hal.390.

⁵⁸ Andre M. Bock dan Ingo Henneberg, *OpCit.*, hal.19

⁵⁹ *Balancing* tidak selalu berupa aksi militer, tetapi juga dapat berupa aksi non militer seperti sanksi ekonomi. Selain itu, aksi *balancing* juga dapat dibagi menjadi dua kategori besar, antara

pada perubahan kekuatan relatif suatu negara yang berhadapan dengan negara lawannya menjadi keunggulan bagi negara tersebut serta memiliki target yang jelas. Pada penelitian ini, *balancing* dapat dilihat pada keputusan Jerman untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pemberian sanksi ekonomi yang lebih luas terhadap Rusia bersama-sama dengan sekutunya yaitu AS dan negara-negara di Uni Eropa.

1.6.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini berawal dari November 2013 ketika gelombang protes masyarakat Ukraina terhadap Victor Yanukovich terjadi disusul dengan keputusan Angela Merkel yang mengedepankan proses damai melalui negosiasi dan diplomasi sebagai mediator dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sampai 13 Maret 2014 ketika Kanselir Angela Merkel dan Menteri luar Steinmer memutuskan untuk mendukung dan menekan Rusia dengan sanksi ekonomi yang lebih luas.

1.6.4 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif karena peneliti mencari eksplanasi dari suatu fenomena yang sedang diobservasi masalah dan perilaku

lain: *positive balancing* yang ditandai dengan peningkatan kekuatan internal suatu negara dalam menghadapi negara yang dianggap sebagai ancaman dan *negative balancing* yang ditandai dengan merusak kekuatan relatif negara lawan terhadap negara yang merasa terancam. Kim He, OpCit., hal.167

suatu negara.⁶⁰ Oleh karena itu, berusaha untuk menghubungkan variabel dengan mengidentifikasi faktor penyebab dan perilaku negara tersebut.⁶¹

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode positivis dengan teknik pengumpulan data sekunder sebagai data empirik dari studi literatur.⁶² Dalam penelitian ini, data-data sekunder yang digunakan berasal dari International Energy Agency, Kementerian Energi Rusia, Komisi Uni Eropa, European Security studies, European Parliament, German Council on Foreign Relations, OSW, House of Commons dan sebagainya.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang menganalisis data kualitatif dan kuantitatif sebagai pendukung dengan pendekatan deduktif.⁶³

⁶⁰ Anol Bhattacharjee, *Social Science Research: Principles, Methods and Practices*, (University of South Florida, 2012), hal.6

⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan variabel dependen yaitu perubahan respon Jerman menjadi mendukung sanksi ekonomi yang lebih luas terhadap Rusia dengan variabel independen yang berupa dorongan eksternal dan posisi Jerman dalam Uni Eropa.

⁶² Data sekunder merupakan data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan ditabulasi oleh sumber-sumber lainnya. Ibid, hal.39

⁶³ Teknik analisis kualitatif tidak menekankan pada analisis berdasarkan statistik, tetapi menekankan analisis peneliti yang dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara data-data yang ada dengan kasus. Selain itu, pendekatan induktif dalam analisis kualitatif merupakan analisis data yang berdasarkan pada hipotesis sehingga data-data yang ada dapat mengonfirmasi hipotesis dalam penelitian ini. Ibid, hal.113.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, serta metodologi penelitian yang berisi penjelasan mengenai definisi konsep, definisi operasional, jangkauan penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan persepsi ancaman Jerman terhadap keterlibatan Rusia.

Bab III menjelaskan respon sekutu selama terjadi krisis di Ukraina sampai berpisahnya Krimea serta posisi Jerman dalam NATO dan Uni Eropa.

Bab IV berisi analisis mengenai kaitan antara persepsi ancaman Jerman terhadap Rusia dan posisi Jerman dalam NATO serta Uni Eropa dengan perubahan kebijakan luar negeri Jerman.

Bab V berisi penjelasan mengenai hasil pengujian hipotesis dan kesimpulan penelitian.